

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

(Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

TESIS

Oleh
INDRA PERMANA
2002190095



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**
(Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**



Oleh

**INDRA PERMANA
2002190095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Nama : **INDRA PERMANA**
NIM : 2002190095

Program Studi : Program Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)” adalah :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penulisan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai lainnya sesuai dengan normal yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 10 November 2023





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : INDRA PERMANA
NIM : 2002190095

Program Studi : Program Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Magister pada program studi magister hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta , 10 November 2023

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIDN : 0020096802

Pembimbing II

Dr. Armudjunto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIDK 898624002

Ketua Program Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN. 0327096504

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.PA.
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 10 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : INDRA PERMANA, S.H.

NIM : 2002190095

Program Studi : Program Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan
dalam Tim
Penguji Tanda Tangan

1. Dr. HULMAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Ketua

2. Dr. ARMUNANTO HUTAHAEN, S.E., S.H., M.H.

Anggota

3. Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA PERMANA
NIM : 2002190095
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 November 2023



INDRA PERMANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul Tesis ini adalah “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)**” Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Edward Sirait, S.E. selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Prof.Dr.dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia .
5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Penguji Sidang Tesis.
6. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan Penguji Sidang Tesis.

7. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Pengaji Sidang Tesis.
8. Para Dosen Pengajar pada Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia
9. Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu menyemangati dalam setiap kegiatan dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UKI.

Semoga karunia-Mu senantiasa menyertai setiap langkah, dan semoga tesis ini menjadi bukti kecil pengabdian penulis dalam meraih ilmu dan kebijaksanaan dari sumber segala pengetahuan.

Jakarta, 10 November 2023

Penulis,

INDRA PERMANA



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi

BAB I PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Penelitian Terdahulu	15
1.6 Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori	19
2.1.1 Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.....	19
2.1.2 Teori Pengembalian Aset.....	23
2.1.3 Teori Pemidanaan	26
2.1.4 Teori Keadilan Sosial	31
2.2 Kerangka Konsep	34

BAB III TINJAUAN PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

3.1 Tinjauan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	42
3.2 Sistem Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	51
3.3 Kendala Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	59

BAB IV ANALISA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA Nomor : 2614 K/Pid.Sus/2021.

4.1 Kasus Posisi Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.....	72
4.1.1 Kronologis	72
4.1.2 Dakwaan	76
4.1.3 Tuntutan Pidana	77
4.1.4 Pertimbangan Hakim	79
4.1.5 Putusan/Vonis Majlis Hakim	87
4.2 Kasus Posisi Putusan Banding Perkara Nomor :2 /PID.SUS- TPK/2021/PT.TJK	89
4.2.1 Dakwaan	89
4.2.2 Pertimbangan Hakim.....	90
4.2.3 Putusan/ Vonis Majlis Hakim.....	101

4.3 Kasus Posisi Putusan Kasasi Perkara Nomor : 2614 K/Pid.Sus/2021.....	104
4.4 Analisan Kasus	106
4.4.1 Analisa Pertimbangan dan Vonis Hakim Nomor :2 /PID.SUS-TPK/2021/PT.TJK dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2614 K/Pid.Sus/2021.....	111
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran	127
 DAFTAR PUSTAKA	129



Abstrak

Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai. Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tidak pidana”, dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalahnya yaitu : 1). Bagaimana Ketentuan Hukum Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara? Selanjutnya Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, Kemudian penutup yaitu: Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021). Dengan demikian 2. Perbedaan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke Satu Primer. Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, ditinjau dari kesalahan yang dilakukan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp.1.910.443.500. selain tidak memberikan efek jera, tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 3 huruf d, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.

Kata Kunci : Pemidanaan, Perampasan Aset, Pidana Korupsi.

Abstract

The word "can" means that an act of corruption has fulfilled the elements of a criminal act after the act was committed, even though the perpetrator returned the loss of state money, the act is still considered complete. As stated in Article 4 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, namely "returning state financial losses or the state's economy does not eliminate the punishment of non-criminal offenders", and has been explained in the explanation of Article 4 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication. The formulation of the problem is: 1). What are the legal provisions for sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia, 2). What are the judges' considerations regarding the application of sanctions for perpetrators of corruption in the form of asset confiscation as an effort to recover state losses? Furthermore, the research method that is in accordance with the problems in this thesis research is to use normative juridical research methods, with the nature of descriptive research. Normative juridical research is a library research carried out by examining secondary data, then closing, namely: Application of Sanctions for Perpetrators of Corruption Crimes in the Form of Confiscation of Assets as an Effort to Recover State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid.Sus/2021). Thus 2. Differences of opinion of the Panel of Judges at the first level and at the appellate level in deciding the actions and mistakes of the accused were convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the Primary One indictment. However, in imposing criminal sanctions on the defendant for 4 (four) years, in terms of the mistakes made, the state losses incurred amounted to Rp. 1,910,443,500. apart from not providing a deterrent effect, it is not in line with the spirit of eradicating corruption as mandated by the Chief Justice of the Supreme Court in Perma Number 1 of 2020 concerning sentencing guidelines Article 3 letter d, which emphasizes that the purpose of punishment is to achieve legal certainty, justice and proportional benefits in imposing Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law.

Keywords: *Punishment, Asset Confiscation, Corruption Crime.*